



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah

RENOVASI STADION MAGUWOHARJO: Foto udara pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (11/10/2024). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi dan renovasi Stadion Maguwoharjo dengan anggaran Rp 108 miliar dan ditargetkan rampung pada Desember 2024.

DITETAPKAN TERSANGKA SUAP LELANG Gubernur Kalsel Ajukan Praperadilan

JAKARTA (KR) - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan dilakukan terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan pada Kamis (10/10) dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sidang pertama gugatan praperadilan tersebut dijadwalkan pada Senin, 28 Oktober 2024.

KPK menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya. "KPK akan menghadapi dan mengawal prosesnya melalui Biro Hukum sesuai aturan yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Jumat (11/10).

Tessa juga mempersilakan Sahbirin Noor untuk menempuh jalur hukum ter-

kait penetapan status tersangka tersebut. "KPK mempersilakan penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan praperadilan," ujarnya.

KPK pada Selasa (8/10) mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan. Penyidik komisi antirasuah juga memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Sahbirin Noor terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tersebut. Larangan keluar negeri tersebut diberlakukan sejak 7 Oktober 2024 dan berlaku selama enam bulan ke depan.

Proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 23 miliar, pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp 9 miliar.

(Ant/Has)-f

SELAMA TRIWULAN-III

KPPBC Kudus Ungkap 118 Kasus Rokok Ilegal

KUDUS (KR) - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah, selama Triwulan III-2024 berhasil mengungkap 118 kasus peredaran rokok ilegal.

"Dari 118 kasus tersebut, barang bukti yang diamankan sebanyak 15,13 juta batang rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM)," kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Sandy Hendratno Sopan di Kudus, Jumat (11/10).

Adapun nilai barang bukti rokok ilegal yang diamankan tersebut, kata Sandy, ditaksir mencapai Rp 20,84 miliar. Sementara potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 14,51 miliar.

Jumlah kasus yang berhasil diungkap tersebut, dipastikan akan

terus bertambah karena selama awal Oktober 2024 juga berhasil mengungkap sejumlah kasus lainnya. Di antaranya, berhasil mengungkap peredaran rokok ilegal dari Kabupaten Jepara dan Kudus dengan mengamankan 597.450 batang rokok ilegal.

Dari jumlah barang bukti rokok ilegal sebanyak itu, sekitar 71.200 batang di antaranya diamankan dari sebuah bangunan di Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, 94.850 batang rokok ilegal diamankan dari agen jasa ekspedisi di Desa Jepang, Ke-

camatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dan 431.400 batang di Jalan Raya Pati-Kudus.

Pengungkapan tiga kasus tersebut, kata Sandy, merupakan hasil analisis informasi intelijen. Lantas Tim Bea Cukai Kudus diterjunkan untuk memastikan informasi tersebut. Dengan adanya penindakan tegas tersebut, diharapkan KPPBC Kudus bisa menekan peredaran rokok ilegal di pasaran, sedangkan potensi kerugian negara berupa pungutan cukai dan PPN hasil tembakau dapat diselamatkan.

Dalam rangka menyadarkan masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal, Bea dan Cukai Kudus juga berkolaborasi dengan Pemda di wilayah kerja untuk melakukan sosialisasi tentang pemberantasan rokok ilegal.

Selain menindak, KPPBC Kudus menginisiasi pembentukan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai salah satu upaya menekan peredaran rokok ilegal yang kini naik status menjadi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Dengan hadirnya KIHT, diharapkan pelaku rokok ilegal bersedia memproduksi rokok menjadi usaha yang legal dengan menyewa tempat produksi yang tersedia di LIK IHT Kudus.

Pelaku pelanggaran rokok ilegal bisa diancam sanksi pidana penjara 1-8 tahun dan denda hingga 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Negara tidak melarang rakyat untuk memproduksi rokok, asalkan sesuai ketentuan yang legal.

(Ant/Trq)-f

Pengawasan-Penindakan Bea Cukai Naik 25%

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap barang ilegal konsisten meningkat sebesar 25 persen tiap tahun dalam 10 tahun terakhir.

"Penindakan ini dilakukan terhadap barang-barang ilegal yang mengganggu perekonomian nasional dan membahayakan sumber daya manusia," kata Sri Mulyani dalam Peringatan ke-78 Hari Bea Cukai di Jakarta, Jumat (11/10).

Dalam beberapa tahun terakhir, jelasnya, penindakan Narkotika Prekursor Psikotropika (NPP) yang telah dilakukan Bea Cukai bersama aparat penegak hukum bahkan mencapai 6 ton pertahun.

Penindakan terhadap perdagangan barang ilegal lainnya juga dilakukan secara masif terhadap ratusan juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol, balpres, kendaraan, barang telekomunikasi, sumber daya alam, serta barang perdagangan lainnya yang masuk dan keluar wilayah Indonesia secara ilegal.

"Ini adalah ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari sisi jumlah yang ditegah, namun ancaman bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan mengalami dampak kesehatan dan biaya rehabilitasi yang mencapai triliunan rupiah," tambah Menkeu.

(Ant/San)-f

KOMINFO RESMIKAN GTD

Pengembangan Talenta Digital Jadi Prioritas



KR-Riyana Ekawati

Wamenkominfo Nezar Patria meninjau Gedung Transformasi Digital (GTD).

YOGYA (KR) - Transformasi digital diperkirakan akan membawa dampak bagi pergerakan ekonomi digital hingga mencapai 100 triliun dolar AS terhadap perekonomian dunia di tahun 2025. Karena itu, pengembangan talenta digital yang berdaya saing perlu menjadi prioritas. Hal itu sesuai visi Indonesia Digital 2045 yang meletakkan masyarakat digital menjadi salah satu pilar yang men-

opang perwujudan Indonesia Digital.

Untuk itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meresmikan Gedung Transformasi Digital (GTD) di Kompleks Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, Jumat (11/10) sore, sekaligus menandai persiapan perubahan nama STMM menjadi Politeknik Digital Yogyakarta. "STMM Yogyakarta ba-

kal bertransformasi menjadi Politeknik Digital Yogyakarta. Dengan begitu STMM diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan TIK yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital nasional," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat meresmikan Gedung GTD secara daring.

Sedangkan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria hadir langsung sekaligus meninjau gedung baru yang menghabiskan biaya Rp 85 miliar tersebut. Menurut Nezar, ada dua bagian dalam GTD. Gedung pertama terdiri empat lantai dan gedung kedua terdiri enam lantai. Gedung itu akan digunakan untuk perkuliahan dan laboratorium animasi maupun pengembangan kecakapan digital.

(Ria)-d

KEMENKO PMK MINTA

Pemda Segera Bentuk Satgas Pornografi

JAKARTA (KR) - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) Woro Srihastuti Sulistyoningrum meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pornografi.

"Menko PMK Muhadjir Effendy selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) meminta semua pimpinan daerah segera membentuk gugus tugas sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tahun 2019," ujar Woro di Jakarta, Jumat (11/10).

Ia menyebutkan, pembentukan gugus tugas ataupun satgas tersebut juga didukung oleh penerbitan Permendagri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 yang salah satunya mengatur alokasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan GTP3.

"Sinergi bersama harus segera dilakukan mengingat kasus pornografi semakin memprihatinkan, dimana berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional

(Pusiknas) Polri 2024, mencatat sekitar 17,13 persen dari total 1.410 korban pornografi, pornoaksi, dan eksploitasi seksual berusia di bawah 17 tahun," katanya.

Ia juga menyampaikan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, dimana jumlah insiden pornografi anak secara daring yang dihimpun dari National Center for Missing and Exploited Children, ada 7.491.564 insiden dari tahun 2019 hingga 2023.

Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian, kecanduan pornografi bahkan lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba karena merusak lebih banyak komponen otak yang terkait dengan pengendalian diri, pengambilan keputusan, tidak peka dengan norma, hingga menurunkan konsentrasi dan motivasi belajar.

"Kita harus segera bergerak dengan segala kekuatan untuk pencegahan pornografi demi menyelamatkan sumber daya manusia dan generasi yang akan datang. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk menangani masalah ini secara komprehensif," ucap Woro. (Ant/San)-f

13.200 ORANG DAPATKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS

BRI Peduli di Berbagai Wilayah di Indonesia



BRI melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli menyelenggarakan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia

KR - Istimewa

JAKARTA (KR) - Pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak dasar setiap orang dan berkontribusi terhadap kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Sebagai salah satu kontribusi nyata kepada pelayanan kesehatan masyarakat, BRI melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli menyelenggarakan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 13.200 orang mendapatkan layanan kesehatan gratis yang tersebar di berbagai wilayah dengan periode pelaksanaan pada 1-2 Oktober 2024.

Masyarakat, khususnya para lansia mendatangi 52 (lima puluh dua) Unit Kerja BRI yang telah ditentukan dan langsung mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan. Layanan kesehatan yang dilakukan antara lain, pemeriksaan tensi darah, kolesterol, gula darah, asam urat, konsultasi dokter secara langsung serta pemberian obat sesuai dengan hasil tes.

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen BRI untuk memberikan social value di tengah masyarakat. "Social value yang di-deliver BRI kepada masyarakat bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak

hak dasar manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat," imbuhnya.

"Hal ini merupakan upaya nyata BRI untuk terus mewujudkan komitmen dalam mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan saja, tetapi juga melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan", ujar Catur.

Catur menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs poin ketiga yaitu Kesehatan dan Kesejahteraan yang baik. Hal ini juga sebagai bentuk implementasi dari

penerapan poin ke-3 (tiga) tentang seluruh isu kesehatan dalam Sustainability and Development Goal's (SDGs) yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

"Kami terus mengajak dan menggerakkan segenap insan BRILian (Pekerja BRI) untuk terus menunjukkan kepeduliannya bagi masyarakat sekitar. Semoga pelayanan kami dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga dan semoga penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis dari BRI Peduli ini dapat membantu meringankan beban masyarakat", tambahnya. (*)



BRI Peduli menyelenggarakan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

KR - Istimewa